

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

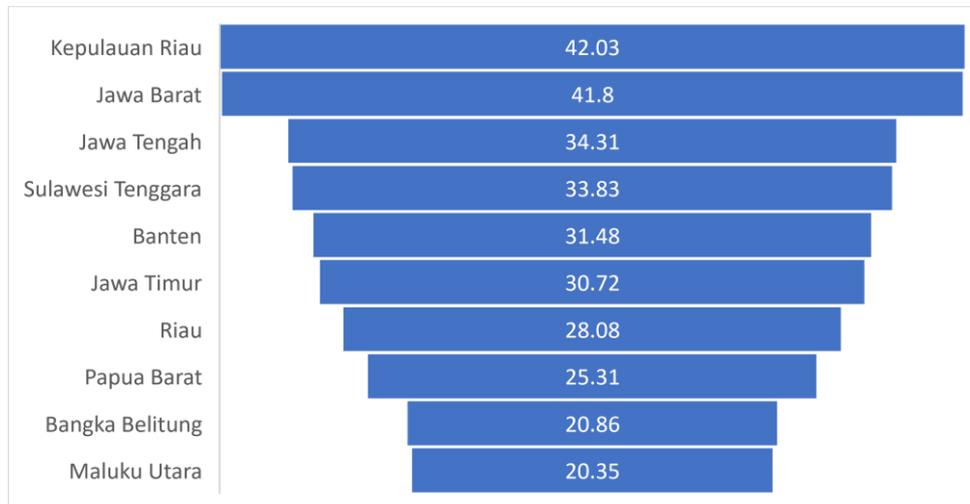
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indeks yang digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan khususnya di Negara berkembang. PDRB adalah nilai tambah dari efek berbagai aktivitas ekonomi di berbagai sektor suatu daerah dan jangka waktu yang saling berhubungan dengan kemampuan wilayah tersebut dalam mengelola sumber daya alamnya (Rumaluntur, 2021). Semakin naik nilai PDRB suatu daerah, semakin naik pula pertumbuhan ekonominya juga akan tinggi. Intinya, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui indeks PDRB ini akan meningkatkan kesejahteraan dan kekayaan penduduk negara. Terdapat dua pendekatan dalam menyusun PDRB maupun PDB yaitu, dengan pendekatan lapangan usaha dan pengeluaran dengan data yang disediakan dengan jumlah nilai tambah yang sudah disusun menurut sumber kegiatan ekonominya (BPS, 2020).

Negara berkembang kerap memiliki permasalahan terkait kurangnya dana yang diberi oleh investor dalam negeri dan asing untuk membeli peralatan modal, sehingga produktivitas tenaga kerjanya pun menjadi sangat rendah. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak tidak menjamin suatu wilayah maju, dikarenakan tidak diiringi dengan keterampilan yang dimiliki oleh penduduk usia kerja. Banyaknya jumlah penduduk harus diiringi dengan keterampilan dan lapangan kerja yang baru sehingga bisa membantu untuk mengurangi jumlah

pengangguran disuatu wilayah. Dalam permasalahan tersebut peran investasi sangat penting karena investasi ini menjadi sumber pembiayaan untuk meningkatkan suatu pembangunan. Pembangunan ekonomi ini merupakan suatu peralihan untuk menjadi ekonomi yang lebih maju. Tujuan dari pembangunan selain menyejahterakan masyarakatnya yaitu untuk memperluas pekerjaan, meningkatkan hubungan antar wilayah dan menyamaratakan pendapatan masyarakatnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terkait sektor-sektor perekonomian terdapat perubahan struktur ekonomi pertanian menjadi sektor industri pengolahan, sehingga sektor manufaktur ini yang menjadi pusat perhatian dalam perekonomian dibandingkan sektor lainnya. Jika pada wilayah agraris tidak berkembang, pabrik pengolahan juga tidak akan berkembang dan sebaliknya. Pembangunan industri menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi pembangunan suatu wilayah, hal ini bisa berjalan beriringan dengan pembangunan regional tanpa mengesampingkan kebutuhan wilayahnya. Proses pembangunan berjalan dengan baik dalam: (i) mendapatkan bahan baku, labor, sumber daya dan (ii) mendapatkan tempat untuk penyimpanan (Karlita, 2013).

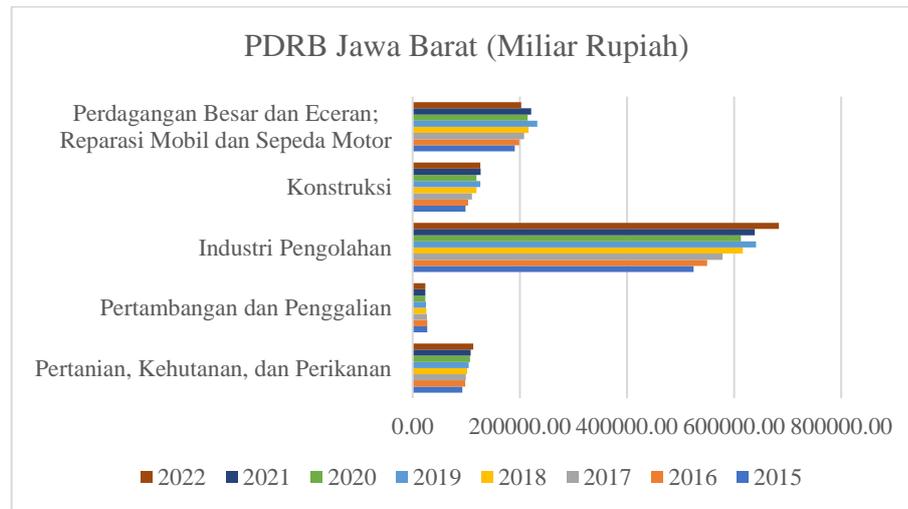
Terdapat 10 provinsi yang sangat berkontribusi di sektor industri yang memberikan peran penting pada pertumbuhan ekonomi wilayahnya yaitu sebagai berikut :



Sumber : BPS yang diolah (2023)

Grafik 1.1 Provinsi berkontribusi dalam sektor industri terhadap PDRB Nasional tahun 2022

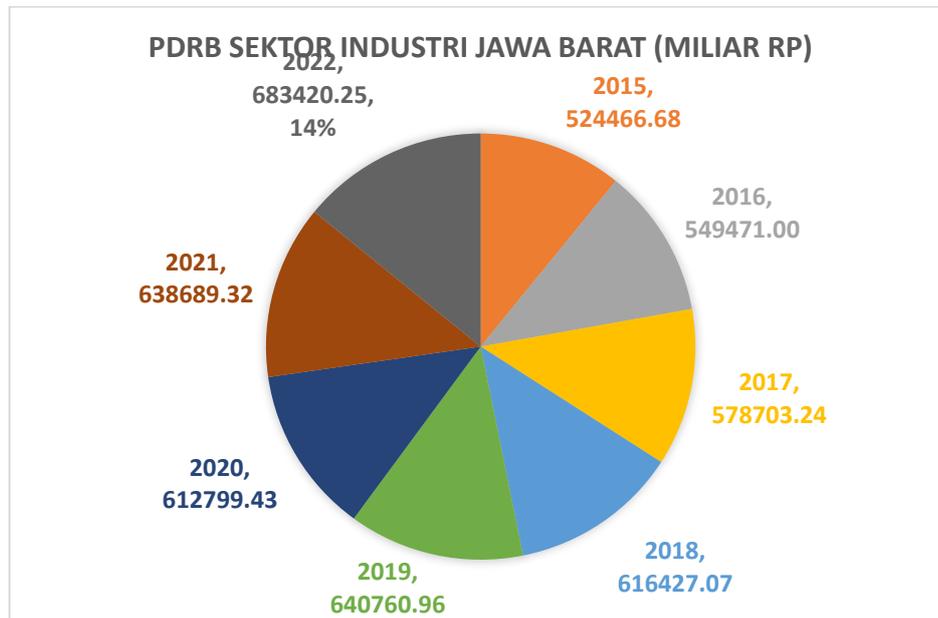
Diketahui pada Grafik 1.1 diatas dengan kontribusi industri sebesar 41.8 persen terhadap PDRB, Jawa Barat ialah salah satu provinsi dengan jumlah PDRB tertinggi kedua setelah Kepulauan Riau dengan 42.03 persen, selanjutnya ketiga terbesar yaitu Jawa Tengah sebesar 34.3 persen, lalu diikuti oleh Sulawesi Tenggara sebesar 33.83%, Banten sebesar 31.48 persen, Jawa Timur sebesar 30.72 persen, Riau 28.08 persen, Papua Barat sebesar 25.31 persen, Bangka Belitung sebesar 20.86 persen dan terakhir Maluku Utara 20.35 persen, dengan demikian industri pengolahan ini menjadi penopang terbesar PDRB di masing-masing wilayah.



Sumber : BPS yang diolah (2023)

Grafik 1.2 5 Sektor Penyumbang angka tertinggi PDRB ADHK Jawa Barat

Berdasarkan grafik 1.2 sektor diatas merupakan sektor-sektor unggulan yang berpengaruh besar dalam memberikan nilai PDRB Provinsi Jawa Barat. Lima sektor tersebut diikuti sektor manufaktur, perdagangan besar dan eceran, sektor pertanian, sektor kontruksi dan terakhir sektor pertambangan. Di antara 74 kawasan industri terbesar di Indonesia, 40 berada di Jawa Barat dengan luas wilayah 23.000 ha dari total 31.000 ha luas industri (Perindustrian, 2014). Nilai PDB sektor industri dari tahun 2015 -2022 adalah sebagai berikut, menurut data BPS Provinsi Jawa Barat.



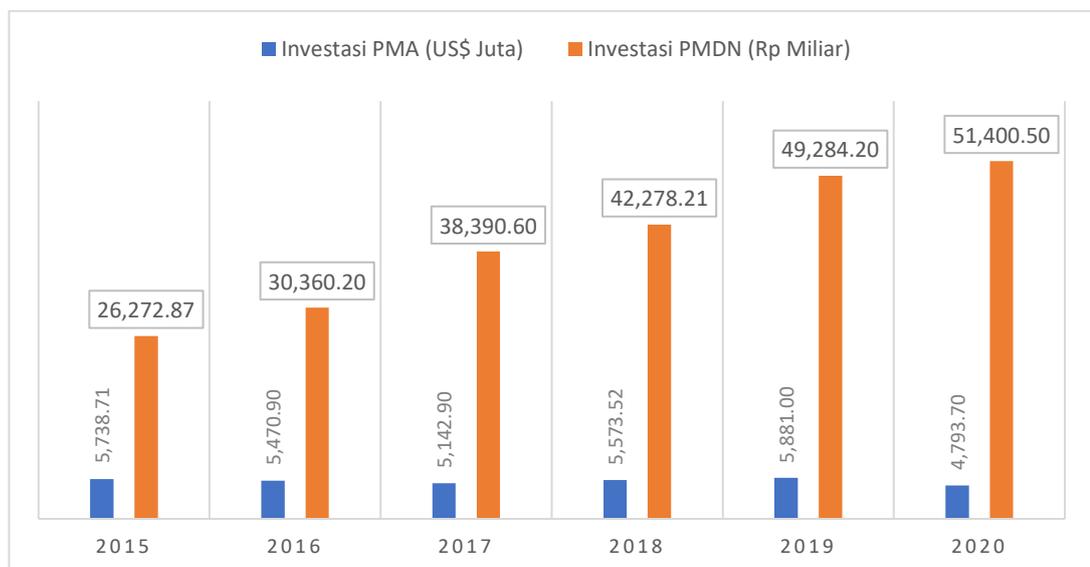
Sumber : BPS yang diolah (2023)

Grafik 1.3 PDRB Sektor Industri Jawa Barat (Miliar Rp)

Pada Grafik 1.3 di atas industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat berkontribusi paling besar terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonominya yaitu terjadi pada tahun 2022 sebesar 683420.25 miliar dan sektor industri pengolahan ini mendapati nilai sektor yang paling unggul dibandingkan sektor-sektor lainnya, hal ini dikarenakan posisi Provinsi Jawa Barat sangat menguntungkan dan infrastruktur yang kuat yang dapat membantu pergerakan komoditas sektor industri ini tumbuh dalam perekonomian daerah.

Kontribusi besar pada sektor industri manufaktur Jawa Barat membuat pemerintah harus meningkatkan potensi di sektor tersebut, bukan berarti Jawa Barat telah terbebas dari suatu ancaman yang bisa membuat turunnya perindustrian, salah satu masalah yang dihadapi yaitu mengenai infrastruktur yang masih sangat kurang.

Keberhasilan masing-masing sektor, terutama sektor industri, tergantung pada modal investasi yang dilakukan baik dalam suatu negara khususnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi ini digunakan untuk membeli barang modal atau peralatan produksi sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi (Harun & Mellita sari, 2021). PMA maupun PMDN ini mampu membuat lapangan usaha bagi yang tidak bekerja untuk mendapatkan pekerjaan, maka dengan adanya investasi ini dapat mengurangi tingkat pengangguran sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja dan mendapatkan hasil (Upah). Berdasarkan data dari BPS dapat dilihat nilai PMA dan PMDN Jawa Barat sebagai berikut :



Sumber : BPS yang diolah (2023)

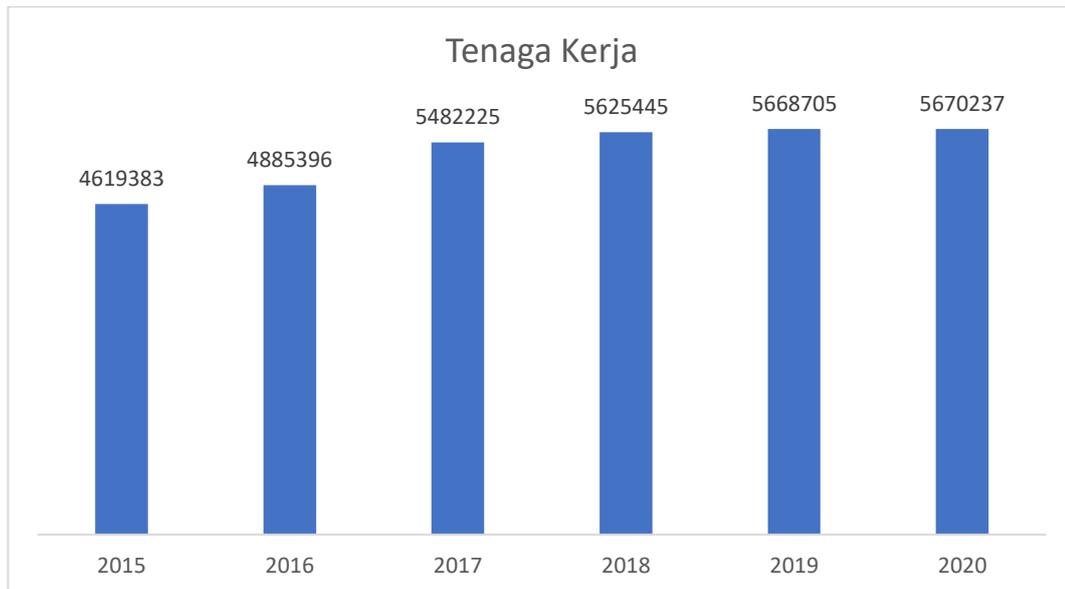
Grafik 1.4 Data PMA(US\$) dan PMDN(Rp Milyar) Prov. Jawa Barat

Dari Grafik 1.4 diatas pada PMDN Jawa Barat meningkat setiap tahun. Kenaikan tertinggi yang diberikan oleh negara terjadi dari tahun 2016 ke 2017 yaitu 30,360.20

naik menjadi 38,390.60. Sedangkan untuk kondisi PMA yang diberikan kepada Provinsi Jawa Barat ini menunjukkan nilai yang naik-turun atau fluktuasi.

Menurut Karlita & Ag, (2013) penyusunan modal atau investasi dapat memperkuat kemampuan produksi yang dapat menambah lapangan kerja, meningkatkan PDRB dan meningkatkan pendapatan nasional di suatu wilayah. Wirawan, (2021) tujuan dari PMA dalam perekonomian adalah menyediakan modal tambahan untuk mengisi kesenjangan permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh PMDN karena tujuan PMA ini adalah untuk merelokasi aset untuk efisiensi yang lebih besar namun hanya pada jangka pendek.

Besarnya nilai investasi ini mungkin berdampak pada seberapa banyak tenaga kerja yang diserap yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penerimaan pajak. Tenaga kerja dimanfaatkan dalam proses produksi industri bersamaan dengan nilai investasi, total tenaga kerja yang dipergunakan pada sektor tidak selalu sesuai jumlahnya (Syafila, 2018). Jika kegiatan produksi tidak diiringi dengan peran kerja kegiatannya akan buruk, tetapi tenaga kerja di bawah standar juga dapat menghambat proses produksi yang akan menyebabkan investasi konsumsi yang lebih rendah (Alhadi, 2022). Sebaliknya, jika tenaga kerja digunakan lebih sering pada tingkat tertentu, lebih banyak barang diproduksi yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan output domestik (Batari,Edy., 2013).

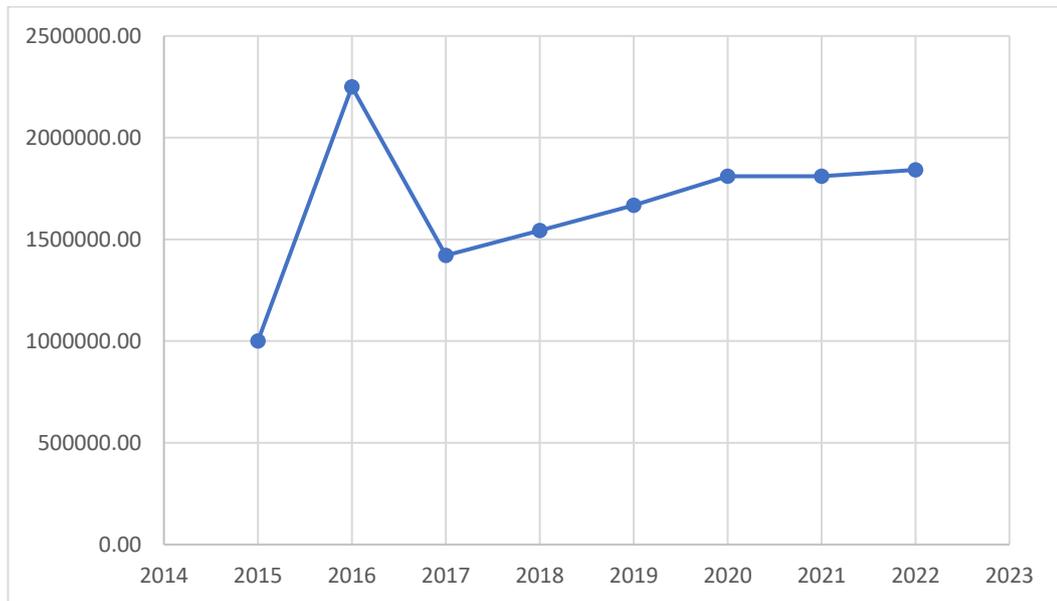


Sumber : Data disperdag yang diolah (2023)

Grafik 1.5 Labor di Industri pengolahan Jawa Barat tahun 2015-2022

Berdasarkan grafik 1.5 dijelaskan bahwa jumlah tenaga kerja yang bekerja disektor industri setiap tahun tahunnya meningkat dari tahun 2015 yang semula 4.619.383 per orang sampai tahun 2020 mencapai 5.670.237 per orang, penambahan jumlah investasi dapat dipastikan akan menaikkan jumlah tenaga kerja hal ini menjadikan tenaga kerja dan investasi sebagai pendorong utama yang dapat mempengaruhi pendapatan.

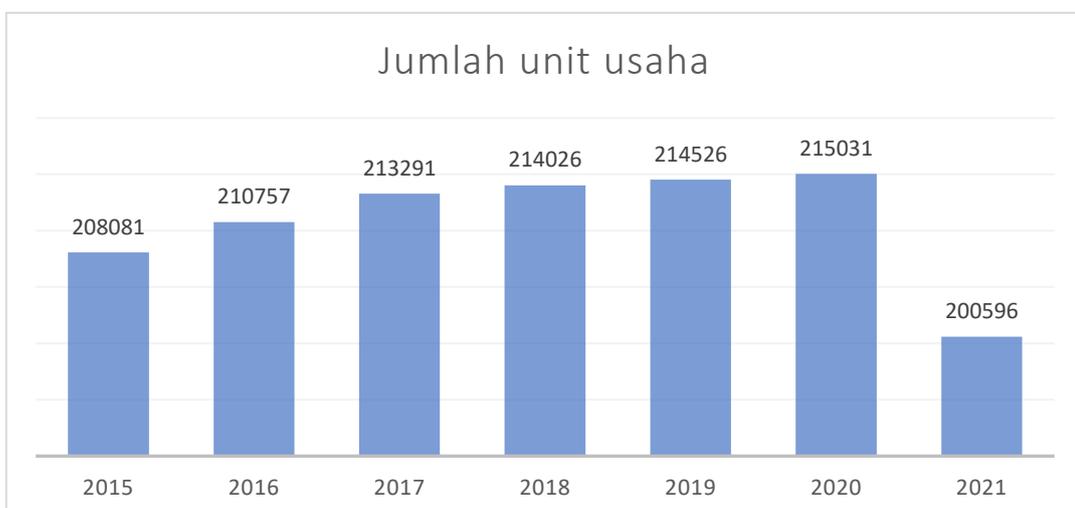
Selain investasi dan tenaga kerja, upah minimum regional atau provinsi juga merupakan bagian dari perekonomian yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja.



Sumber : BPS Jawa Barat yang diolah (2023)

Grafik 1.6 Data upah minimum di Prov.Jawa Barat tahun 2015-2022

Berdasar Grafik 1.6 diketahui upah minimum di Jawa Barat ini mengalami kenaikan seiring tahun, untuk upah minimum terendah sebesar Rp 1.000.000,00 pada tahun 2015 tertinggi mencapai angka sebesar Rp 2.250.000,00 di tahun 2016, untuk tahun 2017 sampai tahun 2022 upah minimum di Jawa Barat semakin naik namun masih dibawah upah minimum di tahun 2016.



Sumber : BPS Jawa Barat yang diolah (2023)

Grafik 1.7 Jumlah unit Usaha di Sektor Industri Jawa Barat 2015-2021

Berdasarkan grafik 1.7 di atas jumlah unit usaha di sektor industri tahun 2015-2021 ini mengalami tren yang terus meningkat. Tercatat pada tahun 2015 terdapat 208081 unit usaha industri kecil, menengah dan besar. Kenaikan tertinggi sebesar 215031 unit usaha pada tahun 2020, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 200596 unit usaha yang mengalami penurunan beberapa periode tahun terakhir.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal lokasi penelitian dilakukan yaitu Provinsi Jawa Barat dengan studi kasus 27 kabupaten per kota dengan tahun penelitian 2015-2022. Dengan menggunakan variabel Investasi, Tenaga Kerja, UMK dan Jumlah Unit Usaha yang masih belum banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya, data diolah menggunakan Stata 14 dengan pendekatan panel statis SUR (*Seemingly Uncorrelated Regression*).

Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Barat dikarenakan PDRB sektor industri pengolahan di Jawa Barat menempati peringkat ke dua dengan sektor PDRB tertinggi di Indonesia setelah provinsi Kepulauan Riau. Selain itu 60 persen industri manufaktur berkembang pesat yang berlokasi di Jawa Barat sehingga mendapat sebutan Jabar Jantung Industri Nasional. Dalam penelitian ini menggunakan variabel investasi dikarenakan hasil investasi Jawa Barat tertinggi di seluruh Indonesia selama 3 tahun terakhir meskipun pada saat pandemi covid-19 dibandingkan pulau jawa lainnya, terutama Jawa Tengah yang tercatat urutan 9 terbesar dalam realisasi investasi di Provinsi Indonesia (Putri, 2022).

Namun dampaknya yaitu penciptaan lapangan pekerjaan di Jawa Tengah cukup tinggi sehingga mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, dimana memiliki jumlah sentra industri mencapai 3.460 sentra, yang menyerap cukup banyak yaitu pada industri makanan yang mencapai 1.555 sentra. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Jawa Barat yang memiliki realisasi investasi tertinggi namun hanya memiliki jumlah sentra sebanyak 1.538 sentra (BPS, 2020).

Banyaknya unit usaha merupakan salah satu faktor penyerapan tenaga kerja terbanyak, tetapi ini tergantung pada jenis bisnis yang ada. Ini juga diakibatkan oleh tenaga kerja yang banyak sehingga menyebabkan kurang terampil dalam mengoperasikan dan memelihara teknologi yang semakin berkembang. Dari catatan BPKM Jawa Barat lebih banyak dipenuhi oleh industri berteknologi tinggi, hal tersebut tak lepas dari Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP Jawa Barat masih rendah dibandingkan Ibukota Indonesia yaitu DKI Jakarta, dimana sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI, (2021) kenailkan UMP/UMK tidak boleh melebihi 10 persen. Dengan adanya permasalahan tersebut maka akan mempengaruhi perekonomian di beberapa daerah di Jawa Barat peningkatan kinerja akan meningkatkan investasi, tenaga kerja, upah minimum dan unit usaha.

Berdasar dari latarbelakang diperoleh judul penelitian **“Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap PDRB Sektor Industri di Povinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022”**

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang dan penjelasan diatas masalah-masalah berikut dapat dirumuskan:

1. Bagaimanakah Pengaruh Investasi terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimanakah Pengaruh Tenaga Kerja terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimanakah Pengaruhnya UMK terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimanakah Pengaruh Jumlah Unit Usaha terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan berikut ditentukan berdasarkan masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara Investasi dengan PDRB Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui pengaruh antara Tenaga Kerja dengan PDRB Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui pengaruh antara Upah Minimum Kabupaten/kota dengan PDRB Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat
4. Untuk mengetahui pengaruh antara Jumlah Unit Usaha dengan PDRB Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi yang dapat memperluas wawasan yang berkaitan dengan pengaruh kegiatan perekonomian dengan PDRB Sektor Industri Pengolahan

2. Bagi Pemerintah : penelitian ini dimanfaatkan untuk bahan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Bagi mahasiswa : diharapkan penelitian ini menambah pengetahuan mahasiswa dan para pembaca lainnya terkait pembahasan penelitian tersebut.